

**DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TIRTO, KECAMATAN GRABAG,
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAISSAFA ANBIYA NUGROHO

NIT. 22314428

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

Agrarian Reform Access aims to improve community welfare through economic empowerment and institutional strengthening. Tirto Village, Grabag District, Magelang Regency, was selected as an Agrarian Reform Access location due to its potential in palm sugar production, agriculture, and micro-enterprises, despite facing challenges related to market access, institutional capacity, and dependence on natural conditions. This study aims to analyze the implementation of Agrarian Reform Access in Tirto Village, its socio-economic impacts, and the factors influencing its implementation. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that Agrarian Reform Access was implemented from 2022 to 2024 through social mapping, business capacity building, institutional strengthening, the establishment and reorganization of BUMDes Gesang Mandiri, the development of Kampung Aren, and market access facilitation. The program contributed to increased community participation, stronger village economic institutions, improved business capacity, and greater income opportunities. The average estimated monthly income of beneficiary palm sugar farmers reached approximately IDR 3,080,000, although it remained vulnerable to seasonal and weather-related fluctuations. Supporting factors included government support, community participation, and abundant palm resources, while limited human resources, restricted market access, and dependence on natural conditions remained major constraints.

Keywords: *Agrarian Reform Access, Socio-Economic Change, Community Empowerment, Tirto Village.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritis	13
1. Reforma agraria.....	13
2. Penataan Akses reforma agraria	15
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
4. Perubahan Sosial	20
5. Perubahan Ekonomi	21
6. Dampak Program	22
7. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	23

C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Definisi Operasional	31
D. Subjek Penelitian	32
E. Jenis dan Sumber data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	41
A. Sejarah Desa Tirto	41
B. Kondisi Geografis.....	43
D. Sektor Usaha Di Desa Tirto.....	46
1. Sektor UMKM	46
2. Sektor Pertanian	47
3. Sektor Perkebunan	47
4. Sektor Peternakan dan Perikanan.....	48
5. Sektor Wisata Religi.....	48
E. Analisis Permasalahan Sektor Usaha Di Desa Tirto	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria di Desa Tirto.....	51
1. Pelaksanaan Program Pada Fase I (2022)	51
2. Pelaksanaan Program Fase II (2023)	56
3. Pelaksanaan Program Fase III (2024)	62
B. Dampak Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	71
1. Dampak Akses Reforma Agraria Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Tirto	71
2. Dampak Akses Reforma agraria Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat Desa Tirto	78

C. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penanganan Akses reforma agraria di Desa Tirto.....	92
1. Faktor Pendorong.....	92
2. Faktor Penghambat.....	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan fundamental bagi pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, yang menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam menjamin pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi fondasi utama sistem hukum pertanahan nasional. Melalui UUPA, negara diberi kewenangan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna memastikan bahwa sumber daya agraria tidak hanya dikelola secara produktif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, tanah dipandang tidak semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan UUPA, pemerintah melaksanakan program reforma agraria sebagai strategi nasional untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah. Program ini merupakan amanat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menegaskan bahwa pembaruan agraria merupakan proses berkelanjutan yang mencakup penataan sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh. Dengan

demikian, reforma agraria tidak hanya dimaknai sebagai redistribusi tanah, tetapi juga sebagai upaya pembenahan menyeluruh terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.

Menurut (Ilham Arisaputra, 2013) Reforma agraria merupakan upaya restrukturisasi mendasar terhadap pola penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah agar tercipta distribusi sumber daya agraria yang lebih seimbang. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Fauzi, 2022) yang menyatakan bahwa tujuan akhir reforma agraria adalah terwujudnya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas tanah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari struktur agraria yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bersifat *legal-formal*, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok petani kecil.

Dalam pelaksanaannya, reforma agraria terdiri atas dua komponen utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berfokus pada pemberian kepastian hukum atas tanah melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, sedangkan penataan akses merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan memastikan bahwa tanah yang telah dimiliki atau disertifikasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Winarso dkk., 2022), penataan akses dilaksanakan setelah penataan aset selesai dilakukan, termasuk melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), legalisasi aset, serta redistribusi tanah kepada subjek reforma agraria.

Lebih lanjut, (Rohman, 2019) menegaskan bahwa penataan akses memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kapasitas atau *capacity building* masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan akses harus berorientasi pada kebutuhan, aspirasi, dan preferensi masyarakat setempat agar mampu mengenali serta mengoptimalkan potensi wilayah yang dimiliki. Penataan

akses tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap penataan aset, melainkan menjadi mekanisme utama yang menentukan keberlanjutan reforma agraria melalui pemberian dukungan nyata kepada penerima manfaat.

Keberhasilan penataan akses dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pada sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui penataan akses, subjek reforma agraria memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan karena difasilitasi dengan berbagai bentuk dukungan, seperti akses permodalan, pelatihan teknis dan manajerial, bantuan sarana produksi, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta perluasan akses pasar. Seluruh bentuk dukungan tersebut telah diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria tahun 2021, yang menegaskan bahwa penataan akses harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan tanah sebagai sumber daya produktif.

Namun demikian, dalam praktiknya penataan akses reforma agraria masih menghadapi berbagai kendala. (Anida dkk., 2018) mengidentifikasi dua faktor utama penyebab kegagalan penataan akses, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, seperti kondisi jenis tanah yang kurang mendukung, dapat membatasi pilihan pemanfaatan lahan, sementara faktor manusia meliputi maraknya peralihan hak atas tanah pasca-redistribusi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme access reform. Selain itu, (Winarso dkk., 2022) menambahkan bahwa keterbatasan permodalan, ketidakpastian hasil panen, serta rendahnya kesadaran terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan turut menghambat optimalisasi penataan akses.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aset tanah atau fasilitas pendukung, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam

memanfaatkan peluang yang diberikan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam proses reforma agraria. Melalui peningkatan kapasitas, perubahan pola pikir, dan penguatan kelembagaan lokal, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan serta menjaga keberlanjutan manfaat program Reforma agraria. Pemberdayaan masyarakat bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal seperti kelompok tani, koperasi, dan UMKM agar masyarakat memiliki fondasi yang kokoh dalam menjalankan fungsi produksi, distribusi, dan pemasaran secara mandiri (Londa, 2014).

Dalam konteks ini, Desa Tirto di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, merupakan salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji terkait pelaksanaan penanganan akses reforma agraria. Desa Tirto memiliki luas wilayah sekitar 3,26 km² dengan jumlah penduduk $\pm$ 2.544 jiwa (BPS, 2017) serta karakteristik pertanian pegunungan yang didukung oleh potensi sumber daya alam, khususnya pohon aren. Pelaksanaan program PTSL di Desa Tirto menjadi pintu masuk bagi penataan akses reforma agraria sebagai program lanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tirto dipilih karena memiliki potensi komoditas aren yang besar, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pasar, kapasitas kelembagaan, dan ketergantungan terhadap kondisi alam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan akses reforma agraria serta dampaknya terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tirto. Potensi lokal Desa Tirto berupa pemanfaatan pohon aren telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti pengolahan buah aren menjadi kolang-kaling, pemanfaatan nira sebagai bahan baku gula aren, serta penggunaan ijuk untuk berbagai produk kerajinan. Keberagaman pemanfaatan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara pengetahuan lokal, kebutuhan ekonomi, dan upaya pelestarian sumber daya alam. Potensi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pendampingan, penguatan kelembagaan, dan perluasan

akses pasar agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal. Namun, penelitian mengenai implementasi *access reform* yang berfokus pada potensi lokal seperti aren masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Tirto setelah pelaksanaan *access reform*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan program penanganan akses reforma agraria dalam bentuk pemberdayaan masyarakat serta dampaknya terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Tirto. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana program penataan akses telah dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan judul **“Dampak Akses Reforma Agraria Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pelaksanaan akses reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek legalisasi aset, tetapi juga sangat menentukan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses dan pemberdayaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program, antara lain kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal. Selain itu, penelitian mengenai reforma agraria di tingkat desa terutama yang berfokus pada implementasi *access reform* berbasis potensi lokal seperti aren serta integrasinya dengan program lingkungan seperti PROKLIM Lestari masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana akses reforma agraria dijalankan di Desa Tirto dan sejauh mana program

tersebut memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program penanganan akses reforma agraria di Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana dampak akses reforma agraria terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tirto?
3. Apa saja faktor yang pendorong dan penghambat pelaksanaan penanganan akses reforma agraria di Desa Tirto?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Reforma agraria di Desa Tirto, baik terkait mekanisme penataan akses, dinamika sosial ekonomi masyarakat, peran kelembagaan lokal, maupun kendala yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Reforma agraria dijalankan dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan memberikan arah yang jelas dalam pengumpulan serta analisis data di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penanganan akses reforma agraria di Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
2. Menganalisis dampak akses reforma agraria terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tirto.
3. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan penanganan akses reforma agraria di Desa Tirto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Reforma agraria, khususnya terkait dampak penataan akses terhadap perubahan sosial ekonomi

masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, seperti komoditas aren.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi aren, memperkuat kerja sama antar-lembaga desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha produktif berbasis sumber daya lokal.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

a. Batasan Substansial

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan program penataan akses reforma agraria (*access Reform*) di tingkat desa. Penelitian tidak mencakup penataan aset (*asset Reform*), proses redistribusi tanah, maupun kajian reforma agraria secara menyeluruh. Fokus utama penelitian meliputi tiga aspek, yaitu: (1) pelaksanaan program penataan akses reforma agraria yang mencakup bentuk kegiatan, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat; (2) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, seperti perubahan partisipasi sosial, pola hubungan masyarakat, pendapatan, serta kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal; dan (3) faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program penataan akses di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada dimensi implementatif dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada aspek normatif atau hukum agraria.

b. Batasan Wilayah Penelitian

Batasan wilayah penelitian difokuskan pada Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa Desa Tirta merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program reforma agraria dan memasuki tahap penataan akses. Penelitian ini menggunakan petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2021. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda.

c. Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu penelitian difokuskan pada periode setelah pelaksanaan program penataan aset (PTSL), yaitu fase ketika penataan akses reforma agraria mulai dijalankan. Penelitian ini tidak mengkaji kondisi sebelum pelaksanaan reforma agraria secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada dinamika pelaksanaan *access reform* dan perubahan sosial ekonomi masyarakat dalam kurun waktu penelitian berlangsung.

d. Batasan Analisis

Penelitian ini hanya menelaah implementasi *access reform* dan dampaknya terhadap masyarakat di tingkat lokal. Penelitian tidak membahas aspek hukum sengketa agraria, konflik penguasaan tanah, maupun analisis kebijakan nasional secara luas. Selain itu, analisis difokuskan pada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, yaitu masyarakat penerima manfaat reforma agraria, perangkat desa, kelompok tani, BUMDes, serta pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang memiliki peran dalam penataan akses. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami proses, dampak, serta faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dampak Akses Reforma Agraria Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang”, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akses reforma agraria telah dilaksanakan sesuai dengan konsep penataan akses dalam reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian atau penataan hak atas tanah, tetapi juga berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa Tirto, BUMDes Gesang Mandiri, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga sektor swasta. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan akses reforma agraria memerlukan sinergi lintas sektor agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Tirto dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pembentukan tim dan penetapan lokasi, pemetaan sosial, penyusunan model pemberdayaan, pelaksanaan pendampingan, serta *monitoring* dan evaluasi. Dalam implementasinya, kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi legalitas usaha, pengembangan pemasaran, akses permodalan, hingga penguatan kelembagaan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut disesuaikan

dengan potensi unggulan Desa Tirta, yaitu komoditas aren, sehingga lahirlah Program Kampung Aren sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Program ini menjadi salah satu implementasi penanganan akses reforma agraria yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan dalam satu kesatuan program pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung Aren memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Tirta. Perubahan tersebut terlihat dari perubahan sistem pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara individual menjadi lebih terorganisasi melalui kelompok usaha dan BUMDes. Perubahan tersebut memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pelaku usaha karena pemasaran tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi melalui kerja sama kelompok. Selain itu, hubungan antarmasyarakat menjadi semakin erat melalui kegiatan pelatihan, pertemuan rutin, studi banding, dan berbagai aktivitas pemberdayaan lainnya yang mendorong meningkatnya komunikasi, koordinasi, serta kerja sama antarpelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program Kampung Aren tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat modal sosial yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan desa.

Program ini juga berhasil memperkuat kelembagaan desa melalui revitalisasi BUMDes Gesang Mandiri sebagai lembaga yang berperan dalam pendampingan masyarakat, pengembangan usaha, pemasaran produk, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Penguatan kelembagaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program karena BUMDes berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun mitra usaha. Selain itu, masyarakat memperoleh berbagai pelatihan yang berkaitan dengan

pengolahan produk, pengemasan, pemasaran digital, manajemen usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, serta sertifikasi halal. Berbagai kegiatan tersebut telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengembangkan usaha berbasis aren.

Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Aren memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pelaku usaha gula aren. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan setelah mengikuti program pemberdayaan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya pelatihan pengolahan produk, perluasan akses pemasaran, fasilitasi legalitas usaha, serta terbukanya peluang kerja sama dengan berbagai mitra pemasaran. Beberapa pelaku usaha bahkan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan setelah memperoleh pendampingan, menunjukkan bahwa program mampu memberikan nilai tambah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, besarnya peningkatan pendapatan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha karena masih dipengaruhi oleh kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang tersedia, kemampuan manajemen usaha, serta tingkat pemanfaatan hasil pendampingan oleh masing-masing penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat masih memerlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Tirto. Faktor tersebut meliputi potensi sumber daya alam berupa pohon aren yang melimpah, tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pemberdayaan, dukungan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sinergi antarinstansi, serta penguatan kelembagaan melalui BUMDes dan kelompok usaha masyarakat. Potensi aren yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun menjadi modal utama dalam pengembangan program Kampung Aren sehingga masyarakat tidak perlu memulai usaha dari awal, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki dengan dukungan program pemberdayaan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan akses reforma agraria. Produksi nira aren masih dipengaruhi oleh faktor musim dan kondisi alam sehingga pasokan bahan baku belum selalu stabil. Selain itu, belum seluruh pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran maupun pengembangan usaha. Inovasi produk juga masih terbatas sehingga sebagian besar masyarakat masih mengandalkan produk gula aren cetak sebagai produk utama. Kendala lainnya adalah belum optimalnya monitoring dan pendampingan setelah program selesai, sehingga sebagian masyarakat masih memerlukan pembinaan lanjutan agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Oleh karena itu, keberlanjutan pendampingan menjadi aspek penting dalam menjaga keberhasilan akses reforma agraria dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa program Kampung Aren sebagai bentuk implementasi akses reforma agraria telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tirto, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah mampu mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, perluasan akses pasar, serta peningkatan pendapatan sebagian besar penerima manfaat. Dengan demikian, program Kampung Aren dapat menjadi salah satu contoh

praktik baik (*best practice*) pelaksanaan akses reforma agraria yang mengoptimalkan potensi lokal sebagai dasar pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Akses Reforma Agraria :

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, perlu meningkatkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkala setelah program selesai dilaksanakan. Pendampingan yang berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa masyarakat mampu mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dibangun melalui program akses reforma agraria. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara berkesinambungan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa Tirto, diharapkan dapat terus mendukung pengembangan program Kampung Aren melalui penyediaan kebijakan, anggaran, serta fasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan inovasi produk berbasis aren, memperluas promosi produk unggulan desa, serta meningkatkan akses terhadap pasar regional maupun nasional agar nilai ekonomi produk semakin meningkat.
3. Bagi BUMDes Gesang Mandiri dan kelompok usaha masyarakat, diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas jaringan kemitraan dengan dunia usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan

pemasaran. BUMDes juga diharapkan mampu menjadi pusat layanan usaha masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemasaran, tetapi juga sebagai *fasilitator* pengembangan usaha, akses permodalan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM berbasis aren.

4. Bagi masyarakat penerima manfaat, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produk, menjaga kualitas produksi, serta melakukan inovasi terhadap produk olahan aren agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga semangat gotong royong dan kerja sama dalam kelompok usaha sehingga keberlanjutan program Kampung Aren dapat terus terpelihara.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai keberlanjutan program akses reforma agraria dalam jangka panjang, termasuk mengukur dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi desa. Penelitian komparatif pada lokasi lain yang melaksanakan program akses reforma agraria juga penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program di berbagai daerah. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan reforma agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angle, John, Nielsen, Scalas, F., & Enrico. (2009). *The Kuznets Curve and the Inequality Process*.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.
- Chambers, R. (2014). Rural Development: Putting the last first. In *Rural Development: Putting the last first*.
- Cornwall, A., & Scoones, I. (2022). Putting the Last First: Reflections on the Work of Robert Chambers. In *Revolutionizing Development: Reflections on the Work of Robert Chambers*.
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Fauzi, A. (2022). Reforma agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2).
- Habiburrachman, Oman Gara, R., & Khorik Saifulloh, M. (2025). Depoliticizing Decarbonization: Energy Plantations and Agrarian Inequality in Rural Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 13(1).
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa kota raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).
- Himes, J. S. (1950). Human Society. By Kingsley Davis. New York: The Macmillan Company, 1949. 665 pp. and Modern American Society. By Kingsley Davis, Harry C. Bredemeier, and Marion J. Levy Jr. New York. Rinehart and Company, 1948. 779 pp.; 1949, 734 pp. *Social Forces*, 29(1).
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).

- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2).
- Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: II. Channels of Group Life; Social Planning and Action Research. *Human Relations*, 1(2).
- Londa, F. M. G. T. dan V. Y. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1).
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based on Regional Potential in The Framework of Agrarian Reform. *Interdisciplinary Journal and Humanity (Injurity)*, 2(4).
- Nur Siami, A., & Asmorowati, S. (2022). Pemetaan Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hasil Laut Desa Bajo dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Patton, M. Q., Rossi, P. H., Freeman, H. E., & Wright, S. R. (1981). Evaluation: A Systematic Approach. *Contemporary Sociology*, 10(2).
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran Gugus Tugas Reforma agraria Dalam Pelaksanaan Reforma agraria Di Kabupaten Lampung Tengah. In *Widya Bhumi* (Vol. 1, Number 1).
- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses reforma agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Tunas Agraria*, 8(3).
- Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (1994). *Journal of Environmental Psychology*, 14(4).
- Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (n.d.). *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*.
- Rieker, P. P., & Weiss, C. H. (1975). Evaluation Research: Methods of Assessing Program Effectiveness. *Social Forces*, 54(1).
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4).

- Sahin, I. (2006). Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 5(2), 14–23.
- Schumpeter, J. (2021). The theory of economic development. In *The Theory of Economic Development*.
- Setyawati, N. W. (2019). Kajian Pengembangan Kewirausahaan pada Kawasan Transmigrasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 8(2).
- Sintala Dewi Ajani, E., & Handajani, L. (n.d.). Hubungan PAD, Beanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1).
- Suci Rahmadani, & Muhammad Imanuddin Kandias Saraan. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15–22.
- Surokim, Rakhmawati, Y., Suratnoaji, C., Wahyudi, M., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Julijanti, D. M., Rachmawati, F. N., Kurniasari, N. D., Trisilowaty, D., Suryandari, N., Cholil, H. A., Quraisyin, D., Moertijoso, B., Rachmad, T. H., Arifin, S., Rozi, F., & Camelia, A. (2016). Buku Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula. In *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*.
- Utomo, A. P., Masyarakat, P., & Upaya, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Kemandirian Ekonomi Melalui Budidaya Ikan Hias. (Studi Pada Agus Koi Farm Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar). *Revitalisasi : Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2).
- Walidin, W., & Tabrani, S. I. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory (2021). *CV. Alfabeta, Bandung*, (September).
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3).
- Wiradi, G., & Shohibuddin, M. (2009). *Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria* (Vol. 68). STPN Press Yogyakarta.